

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 21 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

drh. Indra Dewa
NIP. 19750416 200212 1 001

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Neraca	44
Lampiran 2. Neraca Percobaan Akrual	45
Lampiran 3. Neraca percobaan Kas.....	46
Lampiran 4. Laporan Operasional	47
Lampiran 5. Laporan Perubahan Ekuitas	48
Lampiran 6. Laporan Realisasi Anggaran	49
Lampiran 7. Laporan Realisasi Belanja.....	50
Lampiran 8. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja	51
Lampiran 9. Laporan Realisasi Pendapatan.....	52
Lampiran 10. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan	53
Lampiran 11. Laporan Capaian Kinerja.....	54
Lampiran 12. Berita Acara Rekonsiliasi KPPN	55
Lampiran 13. Berita Acara Rekonsiliasi Internal	56
Lampiran 14. Berita Acara Rekonsiliasi KPKNL	57
Lampiran 15. Laporan Kuasa Pengguna Barang.....	58
Lampiran 16. CRBMN	59
Lampiran 17. Laporan Barang Persediaan.....	60
Lampiran 18. LPJ Bendahara Pengeluaran.....	61
Lampiran 19. LPJ Bendahara Penerima.....	62
Lampiran 20. Memo Penyesuaian.....	63
Lampiran 21. Data Kepegawaian	64
Lampiran 22. Lampiran Lain-lain	65

Halaman Judul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Tabel	5
Daftar Lampiran	7
Pernyataan Tanggung Jawab.....	8
Ringkasan	9
I. Laporan Realisasi Anggaran	9
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	9
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	15
B. Penjelasan atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggara	22
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	22
B.2. Belanja	23
B.3. Belanja Pegawai	24
B.4. Belanja Barang.....	24
B.5. Belanja Modal	25
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26
B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
B.5.4. Belanja Modal Lainnya	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	28
C.1. Aset Lancar.....	28
C.1.1. Persediaan	28
C.2. Aset Tetap	28
C.2.1. Tanah.....	28
C.2.2. Peralatan dan Mesin	28
C.2.3. Gedung dan Bangunan	30
C.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan.....	31
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	31
C.3. Aset Lainnya	31
C.3.1. Aset Tak Berwujud	31
C.3.2. Aset Lain-Lain	32

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya	33
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	33
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	33
C.5. Ekuitas	34
D. Penjelasan atas Pos – pos Laporan Operasional.....	35
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	35
D.2. Beban Pegawai	35
D.3. Beban Persediaan.....	36
D.4. Beban Barang dan Jasa	36
D.5. Beban Pemeliharaan.....	37
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	38
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	38
D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos – pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
E.1. Ekuitas Awal.....	41
E.2. Surplus/Defisit-LO	41
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar	41
E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	41
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	41
E.4.1. Diteima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	41
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	42
E.5. Ekuitas Akhir	42
F. Pengungkapan -Pengungkapan Lainnya.....	43
F.1. Kejadian – kejadian penting setelah tanggal Neraca.....	43
F.2. Pengungkapan lain – Lain.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran	11
Tabel 2. Neraca	12
Tabel 3. Laporan Operasional	13
Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas	14
Tabel 5. Kualitas Piutang	18
Tabel 6. Kelompok Aset Tetap	19
Tabel 7. Pagu Anggaran	22
Tabel 8. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	22
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	23
Tabel 10. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019	23
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	24
Tabel 12. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Des 2018	24
Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Des 2018	25
Tabel 14. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 Desember 2018	26
Tabel 14. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan Desember 2018	26
Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	27
Tabel 16. Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	28
Tabel 17. Mutasi Tanah	28
Tabel 18. Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018	28
Tabel 19. Mutasi Peralatan dan Mesin	29
Tabel 20. Mutasi Gedung dan Bangunan	30
Tabel 21. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	30
Tabel 22. Mutasi Aset Tetap Lainnya	30
Tabel 23. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
Tabel 24. Mutasi Software	32
Tabel 25. Mutasi Aset Lainnya	32
Tabel 26. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	33
Tabel 27. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	33
Tabel 28. Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	35
Tabel 29. Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Des 2018	35
Tabel 30. Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Des 2018	36

Tabel 31. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	37
Tabel 32. Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	37
Tabel 33. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	38
Tabel 34. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	39
Tabel 35. Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	39
Tabel 36. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019	41
Tabel 37. Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019	42

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 21 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

drh. Indra Dewa
NIP. 19750416 200212 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp349.475.898,00 atau mencapai 151,12% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp231.255.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp10.382.853.479,00 atau mencapai 99,85% dari alokasi anggaran sebesar Rp10.398.179.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.085.240.303,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp209.044.751,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp22.742.054.547,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp134.141.005,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp72.348.133,00 dan Rp23.012.892.170,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp349.475.898,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.234.452.861,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-9.884.976.963,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-3.350.486,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-9.888.327.449,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp22.861.181.538,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-9.888.327.449,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10.040.038.081,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp23.012.892.170,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	231.255.000,00	349.475.898,00	151,12	281.730.146,00
Jumlah Pendapatan		231.255.000,00	349.475.898,00	151,12	281.730.146,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.097.253.000,00	3.095.403.788,00	99,94	2.827.166.009,00
Belanja Barang	B.4.	5.979.317.000,00	5.966.519.682,00	99,79	5.710.634.640,00
Belanja Modal	B.5.	1.321.609.000,00	1.320.930.009,00	99,95	2.489.992.282,00
Jumlah Belanja		10.398.179.000,00	10.382.853.479,00	99,85	11.027.792.931,00

II. NERACA

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	209.044.751,00	206.283.753,00
Jumlah Aset Lancar		209.044.751,00	206.283.753,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	11.299.386.000,00	11.299.386.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	6.946.981.897,00	6.477.555.580,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	8.610.275.842,00	8.431.136.842,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	505.303.716,00	505.303.716,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.5.	-4.619.892.908,00	-4.031.524.988,00
Jumlah Aset Tetap		22.742.054.547,00	22.681.857.150,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1.	34.975.000,00	10.000.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2.	647.389.692,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	-548.223.687,00	-1.250.000,00
Jumlah Aset Lainnya		134.141.005,00	8.750.000,00
Jumlah Aset		23.085.240.303,00	22.896.890.903,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	72.348.133,00	35.709.365,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		72.348.133,00	35.709.365,00
Jumlah Kewajiban		72.348.133,00	35.709.365,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	23.012.892.170,00	22.861.181.538,00
Jumlah Ekuitas		23.012.892.170,00	22.861.181.538,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		23.085.240.303,00	22.896.890.903,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	349.475.898,00	269.091.805,00
JUMLAH PENDAPATAN		349.475.898,00	269.091.805,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.088.666.402,00	2.855.411.317,00
Beban Persediaan	D.3.	283.817.037,00	233.757.146,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.746.907.112,00	2.960.545.711,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	676.291.966,00	686.187.662,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.303.428.737,00	1.856.137.635,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.135.341.607,00	925.335.768,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		10.234.452.861,00	9.517.375.239,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-9.884.976.963,00	-9.248.283.434,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	12.638.291,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0,00	8.406.254,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	8.137.916,00	4.959.607,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	11.488.402,00	28.059.238,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-3.350.486,00	-18.867.594,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-9.888.327.449,00	-9.267.151.028,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	22.861.181.538,00	21.122.989.655,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-9.888.327.449,00	-9.267.151.028,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	0,00	-18.850.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	0,00	-18.850.000,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	10.040.038.081,00	11.024.192.911,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	23.012.892.170,00	22.861.181.538,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo

Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	183.285.000,00	183.285.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	47.970.000,00	47.970.000,00
Jumlah Pendapatan	231.255.000,00	231.255.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.497.652.000,00	2.776.061.000,00
Belanja Lembur	321.192.000,00	321.192.000,00
Belanja Barang Operasional	1.320.708.000,00	1.288.738.000,00
Belanja Barang Non Operasional	445.819.000,00	447.869.000,00
Belanja Barang Persediaan	214.122.000,00	283.372.000,00
Belanja Jasa	1.112.200.000,00	976.755.000,00
Belanja Pemeliharaan	615.262.000,00	676.332.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.153.245.000,00	2.306.251.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.099.200.000,00	1.072.092.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	235.000.000,00	224.518.000,00
Belanja Modal Lainnya	40.000.000,00	24.999.000,00
Jumlah Belanja	10.054.400.000,00	10.398.179.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp349.475.898,00 atau mencapai 151,12% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp231.255.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa Lainnya	47.970.000,00	77.530.000,00	161,62
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	183.285.000,00	271.945.898,00	148,37

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Jumlah	231.255.000,00	349.475.898,00	151,12

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 24,05% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	12.680.291,00	- 100,00
Pendapatan Denda	0,00	1.989.715,00	- 100,00
Pendapatan Jasa Lainnya	77.530.000,00	50.970.000,00	52,11
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	271.945.898,00	216.090.090,00	25,85
Pendapatan Lain-lain	0,00	50,00	- 100,00
Jumlah	349.475.898,00	281.730.146,00	24,05

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp10.382.853.479,00 atau 99,85% dari anggaran belanja sebesar Rp10.398.179.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	3.097.253.000,00	3.095.406.572,00	99,94
Belanja Barang	5.979.317.000,00	5.966.519.682,00	99,79
Belanja Modal	1.321.609.000,00	1.320.930.009,00	99,95
Total Belanja Kotor	10.398.179.000,00	10.382.856.263,00	99,85
Pengembalian Belanja		-2.784,00	0,00
Total Belanja	10.398.179.000,00	10.382.853.479,00	99,85

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami penurunan sebesar -5,85% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. disebabkan dengan kenaikan pagu anggaran

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	3.095.403.788,00	2.827.166.009,00	9,49
Belanja Barang	5.966.519.682,00	5.710.634.640,00	4,48
Belanja Modal	1.320.930.009,00	2.489.992.282,00	-46,95
Total Belanja	10.382.853.479,00	11.027.792.931,00	-5,85

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.095.403.788,00 dan Rp2.827.166.009,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,49% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. disebabkan oleh adanya penambahan CPNS dan mutasi pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.774.241.572,00	2.477.406.198,00	11,98
Belanja Lembur	321.165.000,00	349.760.000,00	-8,18
Jumlah Belanja Kotor	3.095.406.572,00	2.827.166.198,00	9,49
Pengembalian Belanja Pegawai	-2.784,00	-189,00	1.373,02
Jumlah Belanja	3.095.403.788,00	2.827.166.009,00	9,49

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.966.519.682,00 dan Rp5.710.634.640,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,48% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- bertambahnya belanja 53 untuk menunjang sarana dan prasana

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.288.122.095,00	1.140.863.405,00	12,91
Belanja Barang Non Operasional	445.918.125,00	736.433.218,00	-39,45
Belanja Barang Persediaan	283.268.021,00	206.979.756,00	36,86
Belanja Jasa	969.490.738,00	1.100.989.964,00	-11,94
Belanja Pemeliharaan	676.291.966,00	669.230.662,00	1,06
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.303.428.737,00	1.856.137.635,00	24,10
Jumlah Belanja Kotor	5.966.519.682,00	5.710.634.640,00	4,48
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.966.519.682,00	5.710.634.640,00	4,48

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.320.930.009,00 dan Rp2.489.992.282,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar -46,95% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- disebabkan penurunan pagu belanja modal

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.071.937.009,00	1.397.446.600,00	-23,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.018.000,00	972.423.682,00	-76,96
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	110.122.000,00	-100,00
Belanja Modal Lainnya	24.975.000,00	10.000.000,00	149,75
Jumlah Belanja Kotor	1.320.930.009,00	2.489.992.282,00	-46,95
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.320.930.009,00	2.489.992.282,00	-46,95

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.071.937.009,00 dan Rp1.397.446.600,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -23,29% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. menurunnya pagu peralatan dan mesin dibanding tahun lalu

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.071.937.009,00	1.397.446.600,00	-23,29
Jumlah Belanja Kotor	1.071.937.009,00	1.397.446.600,00	-23,29
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.071.937.009,00	1.397.446.600,00	-23,29

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp224.018.000,00 dan Rp972.423.682,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -76,96% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. menurunnya pagu belanja modal gedung dan bangunan dibanding tahun sebelumnya

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	224.018.000,00	972.423.682,00	-76,96
Jumlah Belanja Kotor	224.018.000,00	972.423.682,00	-76,96
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	224.018.000,00	972.423.682,00	-76,96

B.5.4. BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp24.975.000,00 dan Rp10.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 149,75% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. adanya kenaikan pagu belanja lainnya

Perbandingan Belanja Modal Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	24.975.000,00	10.000.000,00	149,75
Jumlah Belanja Kotor	24.975.000,00	10.000.000,00	149,75
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	24.975.000,00	10.000.000,00	149,75

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp209.044.751,00 dan Rp206.283.753,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	209.044.751,00	206.283.753,00
Jumlah	209.044.751,00	206.283.753,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.299.386.000,00 dan Rp11.299.386.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.946.981.897,00 dan Rp6.477.555.580,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	6.477.555.580,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.051.937.009,00
Pengembangan Nilai Aset	20.000.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-602.510.692,00
Saldo per 31 Desember 2019	6.946.981.897,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-4.059.510.724,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	2.887.471.173,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp1.045.087.009 (Satu Milyar Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Rupiah), berasal dari:

1. Pengadaan Kendaraan Roda-4 sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan SPK Nomor. 307/PL.010/K.36.C/1/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 444.405.009 dengan rincian sbb:
 - ✓ Pick-up (Hilux) sebanyak 1 (satu) unit
2. Pengadaan Kendaraan Roda-2 sebanyak 7 (tujuh) unit sesuai dengan SPK Nomor. 323/PL.010/K.36.C/1/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.450.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ Sepeda Motor Yamaha Jupiter sebanyak 3 (tiga) unit
 - ✓ Sepeda Motor Yamaha Lexi sebanyak 4 (empat) unit
3. Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 12 (dua belas) unit sesuai dengan SPK Nomor. 606/PL.010/K.36.C/1/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.733.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ Laptop sebanyak 2 (dua) unit
 - ✓ P.C Unit sebanyak 4 (empat) unit
 - ✓ Printer sebanyak 6 (enam) unit
4. Pengadaal Alat Komunikasi (drone) sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan SPK Nomor. 604/PL.010/K.36.C/1/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.149.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ Drone sebanyak 1(satu) unit
5. Pengadaal Alat Komunikasi (Audio Sistem) sebanyak 1 (Set) unit sesuai dengan Kwitansi Nomor. 242/KU.050/3/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.900.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ Loudspeaker sebanyak 4 (empat) unit
 - ✓ Cable sebanyak 1(satu) set
 - ✓ Microphone/Wireless Mic sebanyak 3(tiga) unit
 - ✓ Microphone/Boom Stand sebanyak 1 (satu) unit
6. Pengadaan Alat Laboratorium sebanyak 5 (lima) unit sesuai dengan SPK Nomor. 811/PL.010/K.36.C/2/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.74.000.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ Micro Pippettes sebanyak 1(satu) unit
 - ✓ Multichannel Pipet sebanyak 1(satu) unit
 - ✓ Vortex Mixer sebanyak 2(dua) unit
 - ✓ Hot Plate Strirer sebanyak 1(satu) unit
7. Pengadaan Meubelair sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sesuai dengan SPK Nomor.709/PL.010/K.36.C/1/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.200.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ Meja resepsionis sebanyak 1 (satu) unit
 - ✓ Lemari Besi/Metal sebanyak 6 (enam) unit
 - ✓ Brankas sebanyak 1 (satu)unit
 - ✓ Meja kerja kayu sebanyak 10 (sepuluh) unit
 - ✓ Kursi Besi/Metal sebanyak 6 (enam) buah

8. Pengadaan Fasilitas Gedung (A.C) sebanyak 10 (sepuluh) unit sesuai dengan SPK Nomor.832/PL.010/K.36.C/2/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 79.250.000 dengan rincian sbb:
 - ✓ A.C Split sebanyak 10 (sepuluh) unit
9. Pengadaan Fasilitas Kantor sebanyak 5 (lima) unit sesuai dengan SPK Nomor.711/PL.010/K.36.C/1/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 64.000.000 dengan rincian sbb:
10. Pengadaan Mimbar dan Tempat Koran sebanyak 2(dua) unit sesuai SPK Nomor. 4025/PL.020/K.36.C/9/2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.850.000
 - ✓ Mimbar sebanyak 1(satu) unit
 - ✓ Tempat Koran 1(satu) unit

Mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp602.510.692 (Enam ratus dua juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), berasal dari :

1. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sesuai SK. Penghentian Penggunaan Barang Inventaris BMN Nomor. 5333/Kpts/ PL. 320/K.36.C/11/2019

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.610.275.842,00 dan Rp8.431.136.842,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.431.136.842,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	224.018.000,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-44.879.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	8.610.275.842,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-481.548.493,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	8.128.727.349,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp224.018.000 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya sesuai dengan SPK Nomor. 1365/PL.020/K.36.C/3/2019 CV.Wungu Lipu

Mutasi kurang atas nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp44.879.000 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), berasal dari:

1. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sesuai SK. Penghentian Penggunaan Barang Inventaris BMN Nomor. 5333/Kpts/ PL. 320/K.36.C/11/2019

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp505.303.716,00 dan Rp505.303.716,00.

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-4.619.892.908,00 dan Rp-4.031.524.988,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	6.946.981.897,00	-4.059.510.724,00	2.887.471.173,00
2.	Gedung dan Bangunan	8.610.275.842,00	-481.548.493,00	8.128.727.349,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	505.303.716,00	-59.993.951,00	445.309.765,00
Akumulasi Penyusutan		16.062.561.455,00	-4.619.892.908,00	11.442.668.547,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp34.975.000,00 dan Rp10.000.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	10.000.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	24.975.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	34.975.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-7.912.500,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	27.062.500,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Mutasi tambah atas nilai Aset Tak Berwujud senilai Rp24.975.000 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), berasal dari:
Pengembangan Aplikasi Sicermat dan Siadi sesuai dengan SPK Nomor. 5087/PL.040/K.36.C/10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai
Software	34.975.000,00
Jumlah	34.975.000,00

C.3.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp647.389.692,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	647.389.692,00
Saldo per 31 Desember 2019	647.389.692,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-540.311.187,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	107.078.505,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sesuai SK. Penghentian Penggunaan Barang Inventaris BMN Nomor. 5333/Kpts/ PL. 320/K.36.C/11/2019

C.3.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-548.223.687,00 dan Rp-1.250.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	34.975.000,00	-7.912.500,00	27.062.500,00
2.	Aset Lain-lain	647.389.692,00	-540.311.187,00	107.078.505,00
Akumulasi Penyusutan		682.364.692,00	-548.223.687,00	134.141.005,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp72.348.133,00 dan Rp35.709.365,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	22.491.194,00	29.228.580,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	49.856.939,00	6.480.785,00
Jumlah	72.348.133,00	35.709.365,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp23.012.892.170,00 dan Rp22.861.181.538,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp349.475.898,00 dan Rp269.091.805,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.989.715,00	-100,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	271.945.898,00	216.090.090,00	25,85
Pendapatan Jasa Lainnya	77.530.000,00	50.970.000,00	52,11
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	42.000,00	-100,00
Jumlah	349.475.898,00	269.091.805,00	29,87

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar -29,87% dibanding realisasi 31 Desember 2018 dikarenakan lalu lintas komoditi pertanian meningkat.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.088.666.402,00 dan Rp2.855.411.317,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.886.291.434,00	1.698.784.780,00	11,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.276,00	31.269,00	0,02
Beban Tunj. Anak PNS	46.636.368,00	38.937.400,00	19,77
Beban Tunj. Beras PNS	116.306.520,00	106.167.720,00	9,55

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Fungsional PNS	197.935.000,00	187.660.000,00	5,48
Beban Tunj. PPh PNS	55.000,00	113.850,00	-51,69
Beban Tunj. Struktural PNS	32.410.000,00	31.790.000,00	1,95
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	130.791.804,00	106.432.298,00	22,89
Beban Tunjangan Umum PNS	33.110.000,00	30.705.000,00	7,83
Beban Uang Lembur	321.165.000,00	349.760.000,00	-8,18
Beban Uang Makan PNS	323.934.000,00	305.029.000,00	6,20
Jumlah	3.088.666.402,00	2.855.411.317,00	8,17

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar 8,17 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan CPNS dan mutasi pegawai.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp283.817.037,00 dan Rp233.757.146,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	283.817.037,00	233.757.146,00	21,42
Jumlah	283.817.037,00	233.757.146,00	21,42

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,42 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan lalu lintas komoditas pertanian sehingga mengakibatkan meningkatnya pemakaian dokumen karantina.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.746.907.112,00 dan Rp2.960.545.711,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	445.918.125,00	726.183.218,00	-38,59
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	182.640.000,00	181.200.000,00	0,79
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	10.250.000,00	-100,00
Beban Jasa Lainnya	157.755.000,00	244.815.000,00	-35,56
Beban Jasa Profesi	35.000.000,00	57.500.000,00	-39,13
Beban Keperluan Perkantoran	972.456.249,00	790.751.434,00	22,98
Beban Langganan Air	31.031.300,00	38.918.000,00	-20,26
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	172.761.892,00	235.459.401,00	-26,63
Beban Langganan Listrik	300.980.484,00	265.019.283,00	13,57
Beban Langganan Telepon	139.933.216,00	124.137.404,00	12,72
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	123.479.748,00	157.290.671,00	-21,50
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.546.098,00	11.621.300,00	-17,86
Beban Sewa	175.405.000,00	117.400.000,00	49,41
Jumlah	2.746.907.112,00	2.960.545.711,00	-7,22

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi TA. 2019 mengalami penurunan sebesar -7,22 % dibandingkan realisasi barang dan jasa pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Karena adanya penurunan pagu

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp676.291.966,00 dan Rp686.187.662,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	16.957.000,00	-100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	252.712.200,00	315.208.195,00	-19,83

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Jaringan	19.970.262,00	22.964.100,00	-13,04
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	403.609.504,00	331.058.367,00	21,91
Jumlah	676.291.966,00	686.187.662,00	-1,44

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi TA. 2019 mengalami penurunan sebesar -1,44 % dibandingkan realisasi pemeliharaan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Karena adanya penurunan pagu belanja mengikat sehingga terdapat beberapa unit gedung bangunan, peralatan dan mesin tidak bisa dilakukan pemeliharaan.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.303.428.737,00 dan Rp1.856.137.635,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.405.974.439,00	1.068.672.584,00	31,56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.347.328,00	80.145.200,00	23,96
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.020.000,00	115.856.300,00	-92,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	736.686.970,00	535.373.551,00	37,60
Beban Perjalanan Tetap	52.400.000,00	56.090.000,00	-6,58
Jumlah	2.303.428.737,00	1.856.137.635,00	24,10

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar -24,10 % dibandingkan realisasi perjalanan dinas pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Karena adanya penambahan anggaran biaya perjalanan dinas.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.135.341.607,00 dan Rp925.335.768,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Software	6.662.500,00	1.250.000,00	433,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	193.623.797,00	183.409.773,00	5,57
Beban Penyusutan Irigasi	956.296,00	956.296,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	12.412.334,00	12.412.335,00	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	12.784.599,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	908.902.081,00	727.307.364,00	24,97
Jumlah	1.135.341.607,00	925.335.768,00	22,70

Dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi TA. 2019 mengalami kenaikan sebesar - 22,70 % dibandingkan realisasi beban penyusutan dan amortisasi pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset Gedung bangunan dan peralatan dan mesin.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0,00	-8.406.254,00	-100,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-7.590.760,00	-1.032.738,00	635,01
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-3.897.642,00	-27.026.500,00	-85,58
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	8.137.916,00	4.959.557,00	64,09
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	425.000,00	-100,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	12.213.291,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	50,00	-100,00
Jumlah	-3.350.486,00	-18.867.594,00	-82,24

Surplus / Defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar -635,01% atau senilai Rp. -7.590.760 dibandingkan 31 Desember 2018 karena terdapat penurunan pada beban penyesuaian nilai persediaan, kerugian persediaan rusak/usang.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.861.181.538,00 dan Rp21.122.989.655,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-9.888.327.449,00 dan Rp-9.267.151.028,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-18.850.000,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-18.850.000,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.040.038.081,00 dan Rp11.024.192.911,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.382.853.479,00
Diterima dari Entitas Lain	-349.475.898,00
Transfer Masuk	6.660.500,00
Jumlah	10.040.038.081,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-349.475.898,00 sedangkan DKEL sebesar Rp10.382.853.479,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.660.500,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	6.660.500,00
Jumlah			6.660.500,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp23.012.892.170,00 dan Rp22.861.181.538,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

DIPA tahun 2019 mengalami 7 kali revisi yaitu :

1. DIPA Revisi ke 1 Tanggal 8 April 2019 merupakan revisi di tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo DIPA Revisi ke 1 tanggal 8 April 2019 dengan kategori revisi adalah pergeseran antar output, dalam satu kegiatan yang sama dan dalam satu satker yang sama pada satu Wilayah kerja kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pergeseran untuk memenuhi kekurangan anggaran kegiatan – kegiatan yang lebih prioritas. Jenis revisi adalah pergeseran anggaran dalam POK.
2. DIPA Revisi ke 2 tanggal 27 Juni 2019 merupakan revisi tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo DIPA dengan kategori revisi berupa penambahan minus biaya jabatan structural dan penyesuaian hal III DIPA.
3. DIPA revisi ke 3 tanggal 14 Agustus 2019 merupakan revisi tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo DIPA dengan kategori revisi berupa penambahan alokasi anggaran volume belanja pengadaan sarana dan prasarana standar pelayanan public di seluruh wilayah kerja pelayanan operasional.
4. DIPA revisi ke 4 tanggal 28 Agustus 2019 merupakan revisi tingkat kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Gorontalo DIPA dengan kategori revisi berupa pergeseran anggaran dalam POK untuk pemenuhan sarana dan prasarana standar pelayanan public di seluruh wilayah kerja pelayanan operasional.
5. DIPA revisi ke 5 tanggal 6 September 2019 merupakan revisi tingkat kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Gorontalo DIPA dengan kategori revisi berupa pergeseran anggaran dalam POK
6. DIPA revisi ke 6 tanggal 21 Oktober 2019 merupakan revisi tingkat kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Gorontalo DIPA dengan kategori revisi berupa pergeseran anggaran dalam POK
7. DIPA revisi ke 7 tanggal 28 November 2019 merupakan revisi tingkat kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Gorontalo DIPA dengan kategori revisi berupa revisi administrasi perubahan halaman III DIPA dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan realisasi anggaran tahun anggaran 2019.

F.2. Pengungkapan Lain-lain